

**Prospek Program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi
Daerah Tertinggal (P2SED)**
*The Prospect of Accelerated Program
on Economic and Social Development of Underdeveloped Region*

Hanafi Dahlan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Nitipuran Yogyakarta, Telpon (0271) 377265, E-mail: <Ralhanif@yahoo.com.>
Diterima 19 Juni 2014, direvisi 24 Juli 2014, disetujui 4 Agustus 2014.

Abstract

The condition of Jetis Village, between pre and post program of accelerated social and economy development of underdeveloped regions (P2SED), is different. This research is done to know the continuity of the program in improving and strengthening society self-sustaining to grow by them shelves, especially poor families in the context of continuity program. This research uses a case study method, a research that done deeply related to research subjects. This research is done in Jetis Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Territory, was categorized as underdeveloped village. Data are gathered through deep interview and observation. The research finds that the relation pattern between empowerment process, targeted group, and level of program continuity, is participative enough and able to empower targeted group awareness, and there is a relation between P2DST fund rate of return given to targeted group. The beneficiary got by targeted group is enable to enhance economically, that can be seen in the development of village management and healthy settlement, and the continuation of the program in Jetis Village that enable to empower targeted group to self-sustainability, manifested through their participation and group awareness. It is recommended that KPPSB guidance should be intensified since the beginning of the program, stressed on participation aspect and to grow group awareness to keep the continuity of the program.

Keywords:

Prospect-Program Continuity-Accelerated Program-Underdeveloped Region.

Abstrak

Kondisi Desa Jetis pada saat sebelum dan sesudah adanya program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) terdapat perbedaan, baik dalam hal sosial maupun ekonomi. Penelitian ini ingin melihat kesinambungan program P2SED, dalam meningkatkan dan menguatkan keswadayaan masyarakat agar mampu tumbuh atas kekuatannya sendiri, khususnya warga miskin dalam konteks menjawab isu kesinambungan program. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Jetis, Kabupaten Gunungkidul, DIY yang dikategorikan daerah tertinggal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan pengamatan menggunakan pedoman observasi. Penelitian ini menemukan pola hubungan proses pemberdayaan kelompok sasaran dengan tingkat kesinambungan program, cukup partisipatif dan mampu menumbuhkan kesadaran kelompok sasaran, adanya kesinambungan dari *rate of return* dana P2SED yang disalurkan kepada kelompok sasaran. Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yang secara konkrit dapat dilihat adanya perubahan tata desa dan permukiman yang sehat, adanya kesinambungan program di Desa Jetis yang mampu memberdayakan dan mendorong kelompok sasaran ke arah kemandirian yang tercermin dari aspek partisipasi dan penumbuhan kesadaran kelompok. Direkomendasikan agar pendampingan KPPSB diintensifkan sejak awal program, dengan menekankan aspek partisipasi dan penumbuhan kesadaran kelompok sasaran demi terjaganya kesinambungan program.

Kata Kunci:

Prospek-Kesinambungan Program-Percepatan Pembangunan-Daerah Tertinggal

A. Pendahuluan

Program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) adalah suatu instrumen dari kerangka investasi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), yang melakukan pemberian bantuan

sosial (stimulan) kepada pemerintah daerah dan masyarakat tertinggal, dengan tujuan untuk menstimulasi aktivitas dan kapasitas lembaga sosial ekonomi dalam membina kelompok masyarakat, memperluas kerjasama, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka

kesempatan kerjasama baru antarkelompok masyarakat, dan meningkatkan pengetahuan kewirausahaan masyarakat lokal. Penelitian ini akan melihat prospek ke depan program dan menemukan hal yang mempengaruhi kesinambungan program percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal. Kesinambungan program adalah kunci keberhasilan program dalam rangka peningkatan dan penguatan kemandirian, keswadayaan masyarakat agar mampu tumbuh atas kekuatan sendiri, khususnya warga miskin dalam konteks menjawab isu kesinambungan program.

Desa yang menjadi obyek penelitian adalah Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki sumberdaya alam berlimpah, tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, mengalami ketertinggalan dalam pembangunan wilayah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial terutama masyarakat di perdesaan yang tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap perkotaan.

Pemerintah telah menetapkan prioritas dan arah kebijakan dalam rangka pengurangan ketertinggalan pembangunan antara lain dengan meningkatkan keberpihakan untuk mengembangkan wilayah tertinggal terpencil, serta mengembangkan wilayah perbatasan. Desa yang diprioritaskan program P2SEDPT merupakan daerah yang termasuk tertinggal kondisi sosial ekonominya, aspek sosial bisa disebut tertinggal karena masih banyaknya penduduk yang lulus sekolah dasar. Masih banyak masyarakat yang kurang terampil dalam mengembangkan dan mengolah sumberdaya alam yang berpotensi untuk perekonomian. Jika dilihat dari aspek ekonomi, masih banyaknya pengangguran, keterampilan yang dimiliki relatif rendah, sehingga tingkat daya saingnya rendah dan mengakibatkan ketertinggalan di daerah tersebut.

Sejalan dengan kelanjutan dari strategi pembangunan yang sudah ada, pemerintah menindaklanjuti dengan memberi suatu program pembangunan daerah tertinggal, yaitu program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDPT), yang merupakan salah satu program yang diluncurkan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, secara umum bertujuan menstimulasi aktivitas dan kapasitas lembaga sosial ekonomi dalam membina kelompok-kelompok masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Kementerian Negara PDT (www.kemenegpt.go.id) sejak tahun 2006 mengalokasikan dana stimulan melalui program P2SEDPT yang didistribusikan melalui rekening 115 lembaga sosial di 23 kabupaten daerah tertinggal di 11 provinsi. Dana stimulan dipergunakan untuk penguatan kelembagaan, pelatihan keterampilan serta modal usaha. Salah satu daerah tertinggal di bagian propinsi D.I Yogyakarta adalah Desa Jetis, kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yang menjadi sasaran program.

Sejak tahun 2008, Desa Jetis melalui nama kelompok induknya, Tani Widodo, Desa Jetis, dengan jumlah anggota awalnya 11 orang mendapatkan bantuan dari program P2SEDPT. Stimulan dipergunakan oleh kelompok sasaran untuk penguatan kelembagaan, pelatihan keterampilan serta modal usaha dan harus dapat dipertanggungjawabkan keberlanjutan dan efektivitasnya dari tahun ke tahun untuk keluar dari status Desa tertinggal. Pertanggungjawaban dari dana stimulan tersebut harus dilaksanakan secara efektif dengan pembentuk embrio baru yaitu kelompok sasaran baru dan terus menerus hingga berlanjut dengan efektif.

Pada tahun berikutnya dibentuk lembaga dari program P2SEDPT, Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB), dengan beberapa pengurus dan masing-masing tugasnya. KPPSB adalah lembaga satu-satunya yang bertugas melaksanakan peningkatan kelembagaan agar memotivasi masyarakat Desa Jetis yang berkembang dan berdaya. Keberadaan P2SEDPT sebagai program peningkatan kelembagaan merupakan program unggulan dari pemerintah yang telah berjalan selama empat

tahun, diharapkan mampu menjadi pemacu mengangkat kesejahteraan masyarakat Desa

Kesinambungan program menjadi penting dalam pelaksanaan program P2SED, karena kesinambungan menjadi salah satu faktor untuk menilai keberhasilan suatu program. Dalam rangka melakukan evaluasi program membutuhkan penelitian khusus dengan menitikberatkan pada aspek kesinambungan program. Langkah awal adalah dengan membentuk lembaga Desa yaitu KPPSB yang terdiri atas penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, seksi ekonomi, seksi sosial, dan seksi infrastruktur. Setelah membentuk KPPSB, kemudian masyarakat Desa Jetis dikenalkan dengan sosialisasi dan publikasi kepada kelompok masyarakat Tani Widodo. Dengan berbagai pertemuan rembug Desa, sedikit demi sedikit Desa Jetis yang sebelumnya tidak mengenal lembaga Desa, pada akhirnya bisa berkembang dan menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan proses panjang dan dukungan dari semua pelaku pembangunan (*stakeholders*) termasuk masyarakat Desa Jetis tersebut. Mengingat kondisi sosial ekonomi Desa Jetis yang masih terbatas, tentu saja dalam pelaksanaannya dijumpai banyak hambatan dan kendala, sehingga tingkat keberhasilan program P2SED ditinjau dari aspek kesinambungan perlu diteliti lebih mendalam dalam bentuk suatu penelitian evaluasi kebijakan.

B. Kajian Teori

Pembangunan merupakan suatu konsep yang berubah dari waktu ke waktu (*time specific*) dan dari budaya masyarakat yang satu dengan budaya masyarakat lainnya (*culture specific*), dengan menangkap dan mengantisipasi perubahan dan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi perkembangan paradigma pembangunan dari waktu ke waktu. Untuk mendasari pendekatan penelitian dalam kesinambungan program ini dikemukakan beberapa teori tentang kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, daerah tertinggal dan kesinambungan program yang diteliti.

1. Kemiskinan

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS 2000) yang dimaksud dengan kemiskinan adalah kondisi kehidupan dalam keadaan serba kekurangan, dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Masih banyaknya penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan di tengah proses pembangunan yang langsung juga dapat ditafsirkan karena mereka masih kurang tersentuh oleh program pembangunan. Salah satu penyebabnya dapat ditelusuri dari pendekatan pembangunan yang secara nasional cenderung bersifat sentralistik, *top down* dan *blue print approach* (Mubyarto dalam Sjahrir, 1989: 315). Dari kecenderungan tersebut tidak mengherankan apabila program-program pembangunan lebih mengutamakan generalisasi dan uniformitas, padahal di lain pihak kondisi masyarakat pada tingkat desa dan daerah cukup bervariasi.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah kesenjangan antara program-program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Adanya kesenjangan tersebut dapat dimengerti apabila banyak program-program yang dirancang dari atas dan bersifat seragam tidak menyentuh permasalahan warga masyarakat pada tingkat paling bawah (*grass root*), pendekatan pembangunan semacam ini juga dianggap kurang mengundang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini karena masyarakat sekedar berfungsi sebagai konsumen program, merasa tidak memiliki program tersebut karena tidak ikut terlibat dalam proses perencanaannya. Apalagi jika program-program tersebut dianggap kurang relevan dengan permasalahan dan kebutuhannya (Soetomo, 1995: 139).

Atas dasar pemikiran tersebut, strategi alternatif yang ditawarkan adalah bukan pembangunan yang berorientasi produksi melainkan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centre oriented*), program yang memperhatikan variasi lokal. Pendekatan yang menekankan variasi lokal ini lebih bersifat adaptif, fleksibel dan melalui proses belajar (Honadle and Van Sant, dalam Subejo dan Supriyanto 1997). Lebih lanjut pendekatan ini lebih memberikan peluang

bagi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Berbagai usaha pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dan swasta, seperti pemberian bantuan bagi keluarga miskin merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi yang bersangkutan. Dengan meningkatnya kemampuan ekonomi, diharapkan akan mengangkat kesejahteraan sosial keluarga miskin tersebut. Keluarga yang kuat akan mampu menyediakan sarana dan prasarana hidup keluarga yang sehat, mampu menyekolahkan anaknya, dan mampu turut serta berperan dalam pembangunan sosial masyarakat. Kuatnya ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung keberhasilan perkembangan keluarga ke arah sejahtera dalam kehidupan sosialnya. Pengentasan kemiskinan tidak akan dapat dilakukan hanya dengan memberi finansial saja, tetapi perlu bantuan peralatan, bahan (stimulan), pelatihan keterampilan dan pendekatan sumber-sumber ekonomi bagi mereka.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Subejo dan Supriyanto (2004) adalah sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Dalam arti yang luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya, untuk mencapai suatu kesinambungan dalam jangka panjang.

Dengan pemberdayaan masyarakat, akan terentaskan masyarakat atau keluarga miskin. Pengentasan adalah suatu bentuk kegiatan yang terencana serta berkesinambungan dalam rangka memberikan kesempatan, kemampuan dan kewenangan baik individu, keluarga maupun masyarakat agar bersedia serta mampu memecahkan berbagai bentuk permasalahan, sehingga mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka. Keluarga miskin ada-

lah kelompok masyarakat yang karena hal tertentu tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan memadai untuk melaksanakan fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi perlin-dungan, serta ekonomi. Keluarga miskin sama sekali tidak mempunyai matapencaharian tetap, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pembangunan Perdesaan

Pembangunan perdesaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk perdesaan dalam menguasai langkah sosial, yang disertai dengan meningkatnya tingkat hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut (In-nayahtullah dalam Sulistyo dan Ninik Sri Rejeki, 1994). Definisi ini menimbulkan dua implikasi. Pertama, peningkatan kemampuan penduduk perdesaan dalam menguasai lingkungan sosial tersebut hanya dapat terjadi apabila pembangunan perdesaan merupakan proses pengembangan kemandirian mereka. Kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan menguasai lingkungan sosial tersebut tidak terbatas pada kelompok perdesaan tetapi karena merata di antara penduduk perdesaan. Kedua hal tersebut penting karena penduduk perdesaan akan terhindar dari kekuatan-kekuatan luar yang mengurangi potensi dan membatasi keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Pendekatan sentralistik dan *top down* yang diterapkan oleh pemerintah di semua aspek pembangunan pada era orde baru terbukti telah mengakibatkan masyarakat (terutama masyarakat desa) kehilangan daya *responsive* dan kreativitas dalam membangun masa depannya, taraf kesejahteraan sosial masyarakat semakin memburuk, bahkan terjadi peningkatan penduduk miskin dan permasalahan sosial lainnya yang semakin kompleks, yang kemudian mengantarkan Indonesia pada krisis ekonomi pada tahun 1997 dan berdampak luas pada semua bidang pembangunan.

Permasalahan kemiskinan tampaknya semakin sulit untuk ditangani, sehingga perlu adanya perubahan strategi. Seirama dengan reformasi model pembangunan, usaha kesejahteraan sosial perlu diubah menjadi *bottom up*, yakni masyarakat akan menentukan sendiri kebutuhan mereka. Masyarakat mempunyai *sense of belonging* terhadap kegiatan yang mereka lakukan dan secara bersama-sama akan melakukan kegiatan tersebut, sehingga pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Untuk memperbaiki kondisi masyarakat desa memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan keswadayaan masyarakat dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial dapat meningkat, dan pada gilirannya masyarakat dapat mengaktualisasikan diri eksistensinya secara positif dalam program-program aksi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Berdasarkan uraian di atas analisa penelitian prospek kedepan Program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) ini dilaksanakan.

4. Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal ini berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju). Kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan

keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan program pembangunan daerah tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antarnegara, daerah pulau-pulau kecil, daerah pedalaman, serta daerah rawan bencana. Permasalahan kesejahteraan sosial yang menonjol di daerah tertinggal adalah kemiskinan yang berdampak pada berbagai masalah lainnya seperti meningkatnya fakir miskin, rumah tidak layak huni, minimnya pelayanan kesehatan, wanita rawan sosial ekonomi, tindak kekerasan dalam rumah tangga, keterlantaran pada anak dan lanjut usia, sarana pendidikan yang tidak terjangkau oleh warga yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan bahkan putus sekolah (Bambang Rudito, 2009:28-?9).

5. Kestinambungan Program

Salah satu aspek yang menjadi kajian penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada kestinambungan program P2ESDT. Banyak istilah lain yang berkaitan dengan kestinambungan yang artinya kurang lebih sama yaitu kelangsungan, kelestarian, terus menerus, dan berkelanjutan. Istilah-istilah tersebut merupakan terjemahan Indonesia dari istilah *sustained*, *sustainable* dan *sustainability*. Pada intinya mengandung pengertian bahwa suatu kegiatan disebut berlanjut (*sustained*) apabila kegiatan tersebut dapat berlangsung dan mendatangkan manfaat secara terus menerus. Tjokrowinoto (1993), mengemukakan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang terwujud dalam berbagai proyek menghendaki adanya arus manfaat yang tidak berakhir pada saat proyek tersebut selesai, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran proyek.

Ketidakmampuan proyek dalam menciptakan kestinambungan telah membawa akibat pada tidak tercapainya proyek tersebut dalam memberikan manfaat bagi peningkatan kese-

jahteraan kelompok sasaran (Tjokrowinoto, 1987). Pada tingkatan program, kesinambungan berkaitan dengan keterbatasan dana pemerintah, termasuk dana yang bersumber dari bantuan luar negeri, sehingga harus digunakan secara efisien dan bertanggung jawab, hanya untuk kegiatan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Secara mikro kesinambungan diartikan sebagai derajat kesinambungan arus manfaat program bagi penerima manfaat proyek atau kelompok sasaran untuk pembangunan lebih lanjut (Cernea, 1986).

Dari definisi tersebut setiap proyek dinilai berhasil mencapai tujuannya apabila telah memperoleh dukungan teknis dan finansial dari pemerintah, secara terus menerus mampu mempertahankan dan mengembangkan kinerjanya, juga setelah berakhirnya dukungan tersebut, sehingga tetap tercipta arus manfaat bagi kelompok sasaran. Untuk melihat tingkat kesinambungan program percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2ESDT) perlu diungkap: Pelipatgandaan, yaitu kemauan dan kemampuan kelompok sasaran untuk mengembangkan program secara terus menerus; Adanya arus manfaat secara terus menerus yang diperoleh kelompok sasaran; Lembaga pengelola proyek yang dibentuk mampu mengelola program dengan baik (Cernea, 1986).

C. Penggunaan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu dan kelompok. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Studi kasus dapat diartikan sebagai suatu teknik mempelajari in-

dividu atau kelompok secara mendalam untuk membantunya memperoleh penyesuaian diri yang baik

Pengumpulan Data dipergunakan dengan teknik: (a) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*), yaitu dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara bebas terpimpin, yaitu cara mengajukan pertanyaan yang dikemukakan bebas, artinya pertanyaan tidak terpaku pada pedoman wawancara tentang masalah-masalah pokok dalam penelitian, kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan (Sutrisno Hadi, 1994: 207). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berulang-ulang terhadap informan. Wawancara dianggap selesai apabila sudah menemui titik jenuh, yaitu sudah tidak ada lagi hal yang ditanyakan. (b) Observasi, yaitu observasi non-partisipan, peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan yang subjek lakukan, tetapi dilakukan pada saat wawancara. Pengamatan yang dilakukan menggunakan pengamatan berstruktur yaitu dengan melakukan pengamatan menggunakan pedoman observasi pada saat pengamatan dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah penyajian data (*Display Data*), yaitu data tersusun sedemikian rupa sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dalam bentuk yang lazim digunakan yaitu teks naratif. Penarikan kesimpulan, yaitu pengungkapan mengenai makna dari data yang dikumpulkan.

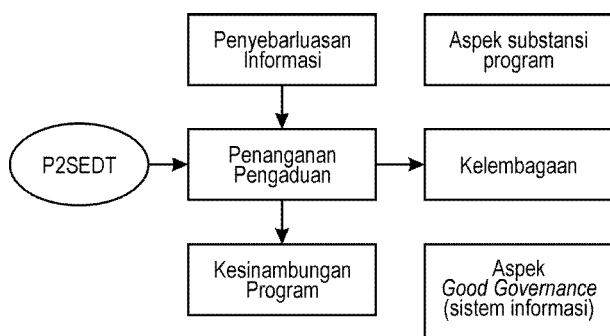
D. Hasil Penelitian: Kesinambungan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Desa

Kesinambungan program merupakan suatu proses untuk mengupayakan agar hasil pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal dapat terpelihara dan dikembangkan, sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan program secara partisipatif menjadi bagian yang sangat menentukan, sehingga pelibatan mereka dalam setiap tahapan proses kegiatan menjadi sangat penting karena akan memberikan kesempatan belajar secara langsung.

Penguatan kelembagaan masyarakat melalui P2SEDIT harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan (*sustainable*), begitu kegiatan pembangunan baik dalam bidang fisik maupun non fisik selesai, pemanfaatannya harus diupayakan secara maksimal agar penerima manfaat dapat menikmatinya. Masing-masing kegiatan pembangunan tersebut akan sangat berbeda kelanjutan atau pemanfaatannya. Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan system dan proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip penguatan kelembagaan masyarakat melalui P2SEDIT harus mampu memberi dampak perubahan positif dan berkesinambungan.

1. Ruang Lingkup Program P2SEDIT

Setelah mengamati dan observasi langsung di lapangan, banyak temuan di lapangan beserta informasi dari beberapa wawancara dengan informan menunjukkan tentang kesinambungan program P2SEDIT di Desa Jetis. Berikut ini diuraikan hasil temuan lapangan yang terkait dengan kesinambungan P2SEDIT di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.



Bagan 1.
Ruang Lingkup Program P2SEDIT

Ruang lingkup dari kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan masyarakat yang prima. Kelembagaan dimaksud adalah pembentukan KPPSB (Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa), yang mempunyai peran sangat penting terhadap kesinambungan program. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan membutuhkan dukung-

an yang optimal dan waktu yang panjang. Pengembangan kelembagaan yang sama sekali baru membawa konsekuensi munculnya biaya dengan perangkat administrasi yang baru sehingga menjadi efisien. Akan tetapi pada sisi lain, menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang sudah ada dengan segala perangkatnya yang serba terbatas, mengandung potensi kegagalan implementasi kebijakan pembangunan, sehingga menjadi tidak efektif.

Melihat kondisi masyarakat Desa Jetis yang tingkat SDM-nya rendah, maka program P2SEDIT sangat membantu sebagai sistem penunjang penguatan kelembagaan pada semua level pemerintahan menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri. Pemberdayaan dapat dilihat dari aspek potensi Desa jetis, sektor pertanian dan peternakan adalah mata pencaharian yang mendominasi. Dua sektor tersebut menjadi suatu potensi yang dapat membawa Desa Jetis menuju desa yang berpembangunan sosial dan ekonomi. Akan tetapi sangat disayangkan dengan sumber daya alam yang melimpah, mayoritas pertanian dan peternakan yang mendominasi, dalam mengelola usaha budidaya pertaniannya masih berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Hasil panen pertanian ataupun peternakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bertolak dari realitas dan perilaku petani dan peternak di atas, diperlukan strategi dan cara pengelolaan sumber daya alam lokal secara berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu cara adalah membangun kawasan produksi melalui pendekatan *cluster* dengan pilihan komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) merancang kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT). Dalam kepentingan penyusunan penelitian ini, tema yang diangkat adalah kesinambungan P2SEDIT Desa Jetis. Dengan menggunakan pendekatan pengembangan usaha dan investasi skala sedang dan besar di sub sektor sesuai dengan potensi unggulan daerah, dalam hal ini Desa Jetis di sub sektor pertanian dan peternakan. Dalam rangka investasi KPDT juga melakukan pemberian bantuan sosial (stimulan) kepada

pemerintah daerah dan masyarakat melalui instrumen-instrumen yang dikembangkan dari P2SED. Desa Jetis memperoleh bantuan dari P2SED dengan meningkatkan kapasitas penguatan kelembagaan yang dibentuk KPPSB dan pemerintah setempat. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan itu berupa lembaga sosial ekonomi mikro yang memiliki jumlah anggota 25 orang berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah setempat. Salah satu ketentuannya adalah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, perajin, peternak, nelayan dan pedagang kecil. Penggunaan dana ini juga harus dipertanggungjawabkan dengan benar serta kelompok yang bersangkutan tidak mendapat bantuan sosial dari lembaga lain pada tahun yang sama.

P2SED kemudian membentuk KPPSB di daerah sasaran. Tim KPPSB adalah pengurus kelembagaan yang melakukan pendataan serta melakukan upaya pemeliharaan dan pengembangan aset program. Kelembagaan P2SED mempunyai peran dan tanggung jawab sangat berarti untuk pelaksanaan program dan keberlanjutan.

2. Kapasitas Kelembagaan KPPSB terhadap Kesenambungan P2SED

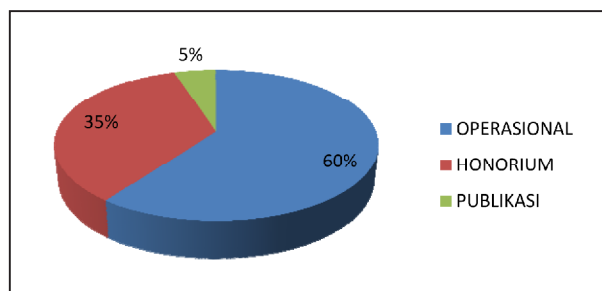
Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB), adalah relawan-relawan dari warga Desa setempat yang memiliki kepedulian serta komitmen yang besar terhadap permasalahan ketidakberdayaan warga dan kondisi pembangunan di desanya yang masih tertinggal. KPPSB juga merupakan Forum Warga, sebagai wadah peran serta dan artikulasi kepentingan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan Desa mereka. KPPSB juga disebut sebagai kelembagaan masyarakat yang dibentuk dari dan oleh masyarakat desa setempat. KPPSB sebagai Forum Warga dilegalisasi melalui surat keputusan bupati.

Tahap pertama, dilakukan wawancara terhadap Wagiran, A.Ma.Pd selaku kepala desa di sela-sela waktu kerja di balai desa. Peneliti melakukan *in depth interview* kepada Bapak Wagiran selaku informan yang terpercaya. Bapak Wagiran memberikan penjelasan dan pemaparan mengenai bagaimana proses pen-

dampingan dan kesinambungan dari program P2SED di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari. Bapak Wagiran juga menceritakan tentang bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Jetis secara garis besar serta gambaran mengenai keberadaan program P2SED di Jetis.

“Program P2SED di Desa kami ini berawal pada tahun 2008, sampai sekarang masih banyak kendala dalam proses kesinambungannya. Tadinya kami tidak tahu bantuan itu datang dari Kementerian Negara dan bernama P2SED, karena bantuannya sudah keluar dan cair, kami menerima 10 juta untuk tugas KPPSB, dan bantuan berupa kambing dari program P2KPDT juga sudah keluar, tapi kami selaku pemerintah Desa belum mengetahui secara jelas karena kurangnya sosialisasi dari pihak kementerian atau Bappeda. Jadi uangnya sudah ada, kambing-kambingnya juga sudah diberikan tapi warga dan kami kurang mengetahui secara gamblang dari mana bantuan tersebut datang, tahunya dari pemerintah saja. Tidak tahu tentang P2SED. Setelah itu dari pihak Bappeda mengamanatkan untuk membentuk tim KPPSB dengan uang 10 juta yang diterima sebagai dana operasinya. Dan baru tahun 2011 kita membentuk anggota-anggotanya.”

Bapak Wagiran juga memberikan nama-nama anggota KPPSB dan rincian anggaran belanja dari bantuan sosial yang diterima dari kementerian negara sebesar 10.000.000 rupiah yang ditransfer dari pihak kementerian negara ke Tim KPPSB melalui rekening yang wajib dibuat oleh KPPSB, yaitu rekening BRI 6984 Unit Playen Wonosari (6984-01-014246-53-3).



Bagan 2.
Komposisi Pemanfaatan Bantuan

Rincian komposisi pemanfaatan bantuan KPPSB di atas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPPSB melalui P2SEDIT 2009. KPPSB masing-masing diberi dukungan dana Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah per kabupaten) yang diperuntukkan, dukungan sarana alat tulis kantor dan operasional KPPSB (60%), insentif pengurus KPPSB (35%), publikasi program di desa (5%). Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat pemerintah daerah kabupaten dan provinsi menyediakan dana pendukung melalui APBD masing-masing, besaran dana pendukung disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kelompok-kelompok pemanfaat difasilitasi melalui bidang-bidang kegiatan KPPSB (Ekonomi Lokal, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Infrastruktur, kelembagaan, Kesehatan Masyarakat) terutama dalam pengelolaan bantuan sosial KPDT. Pembentukan kelompok didasarkan pada hasil identifikasi kelompok sasaran, jenis kegiatan yang akan dikelola, kohesitas sosial, yang disepakati bersama oleh warga setempat. Proses pembentukan kelompok kegiatan KPPSB dilakukan melalui proses pertemuan warga yang teridentifikasi sebagai calon kelompok sasaran, diusulkan dan diminatkan persetujuan dalam musyawarah warga masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Pengusulan dan persetujuan musyawarah warga masyarakat tersebut terkait dengan transparansi, akuntabilitas, prioritas kegiatan dan fasilitasi bantuan sosial, serta tanggung jawab bersama.

Kelompok Kegiatan KPPSB dalam mengelola kegiatan dan organisasi kelompok memperoleh pendampingan dari KPPSB. Pada langkah awal dan proses pembelajaran untuk penguatan kapasitas, KPPSB memperoleh pendampingan oleh tenaga fasilitator desa (TFD) dengan dukungan konsultan manajemen kabupaten (KMK). Kegiatan pendampingan kelompok kegiatan merupakan media untuk proses pembelajaran bersama KPPSB, anggota kelompok, masyarakat dan pemerintah desa. Di Desa Jetis, TFD atau tim fasilitator desa adalah Sidik Triyono S.PdI. Informasi yang diperoleh dari

Bapak Sidik dari hasil wawancara di rumah sebagai berikut.

“Saya kebetulan menjabat sebagai TFD ini baru diangkat awal Agustus 2008. Sebelumnya, saya sebagai KMK dari P2SEDIT. Sebenarnya program ini sangat membantu masyarakat Desa ini, tapi karena sosialisasinya kurang, maka kurang efektif dalam proses pelaksanaannya. Banyak kendalanya. Dari masalah pembentukan KPPSB yang sangat terlambat sampai ke tingkat kelompok sasaran yang kurang diperhatikan. Diawalnya, tahun 2009 itu yang cukup amburadul, kalau sekarang sudah cukup meningkat.”

Pendapat tersebut sama halnya yang diperoleh saat wawancara dengan kepala Desa Jetis, yaitu kurangnya sosialisasi program tersebut pada masyarakat, bahkan kepada pemerintah desa. Oleh karena kurangnya sosialisasi terhadap program, tahap kesinambungan program terganggu, sehingga setelah dilakukan penelitian, kegagalan pada awal proses program muncul. Tim kelembagaan, KPPSB, terlambat dibentuk yang menjadikan program terbengkelai di awal tahap pelaksanaan program dan dihidupkan kembali awal tahun 2011.

Berhasilnya suatu program akan melalui beberapa tahapan, di antaranya tahap inisiasi, dengan kegiatan utama bimbingan teknis yang melekat pada masing-masing kegiatan terhadap kelembagaan yang sudah ada, dan hanya menjangkau beberapa lokasi. Kemudian tahap instalasi, yang dengan kegiatan utama konsolidasi (internal) kelembagaan yang sudah ada serta optimalisasi peran dan fungsinya. Dalam penahapan instalasi, aspek kelembagaan pada kelompok penerima manfaat dan pengelola program pembangunan daerah tertinggal mempunyai ruang substansial yang sama dalam hal penyebarluasan, penanganan pengaduan dan kesinambungan program yang dapat dioptimalkan peran dan fungsinya (deputi bidang pembinaan lembaga sosial dan budaya KNPDT, *Penguatan kapasitas Kelembagaan*, Jakarta, 2011).

Masih dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan P2SEDIT di Desa Jetis ini, pada tahun anggaran 2011 fokus program penguatan

kapasitas kelembagaan P2SEDТ adalah penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat daerah tertinggal. Walaupun pembentukan kelembagaan di Desa Jetis tergolong terlambat, tetapi tanggap kelompok sasaran untuk menata kembali dari substansi tujuan program dilaksanakan dengan penuh semangat gotong-royong. Berikut wawancara dengan Bapak Suharjo :

“Langsung tanggap dengan baik, waktu di-suruh Bappeda untuk membentuk KPPSB supaya cepat terbentuk dan berfungsi Kelompok Kerja di dalamnya. Waktu itu, sorenya kita langsung mengadakan rembug dengan pamong desa dan warga.”

Setelah melakukan telusur silang dengan pihak Bappeda, ternyata perintah pembentukan KPPSB dari pusat, yaitu dari Kementerian Negara PDT juga terlambat. Berikut hasil wawancara dengan salah satu pihak Bappeda:

“Kita mengajukan proposal program ke Kementerian Negara PDT, kemudian setelah diterima, bantuan tersebut cair, tetapi perintah untuk membentuk pengurus kelembagaan program justru setelah bantuan cair. Kemudian keluar lagi tahun 2011, dana 10 juta, untuk pembentukan KPPSB sebagai fasilitator pelaksana program. Jadi dari pusatnya pun perintahnya juga terlambat.”

Peningkatan kapasitas kelembagaan di Desa Jetis dilakukan melalui peningkatan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama dengan melakukan pendekatan kelompok sasaran melalui sosialisasi guna peningkatan peran dan eksistensi kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui kerjasama antarlembaga dalam masyarakat. Secara konkritnya, KPPSB sudah menjalankan peran dan kewajibannya untuk melakukan sosialisasi dan publikasi program kepada OMS-OMS, atau kelompok masyarakat. Terbukti telah diadakan beberapa pertemuan bertahap dan rutin dengan masyarakat Jetis. Sosialisasi yang diadakan KPPSB untuk warga jetis selanjutnya dilakukan beberapa pendataan dan pemetaan masalah pembangunan desa secara partisipatif sebagai penyusunan perencanaan pembangunan desa, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya,

KPPSB akan menerima dan menindaklanjuti pengajuan masyarakat tentang program pembangunan Desa.

Banyak sekali dari hasil penemuan rembug desa dengan KPPSB, di antaranya keluhan dari kondisi infrastruktur Desa Jetis yang sangat memprihatinkan terutama kondisi perhubungan jalan. Selain itu, masih banyaknya pemukiman kumuh, di antaranya kamar mandi dan WC di luar rumah yang tidak sehat dan belum memenuhi standar. Melihat kondisi Desa seperti itu, KPPSB mempunyai peran penting untuk mengorganisasikan seluruh kegiatan percepatan daerah tertinggal. Kinerja KPPSB yang makin terorganisir akan sangat membantu kesinambungan program. Hasil dari kerjasama KPPSB dengan kelompok sasaran yang baik, menghasilkan pembangunan desa yang cukup merata, dan menjadi temuan penting dalam penelitian ini.

3. Kemauan dan Kemampuan Kelompok Sasaran untuk Mengembangkan Program

Berkaitan dengan kinerja KPPSB untuk mengamati perkembangan kelompok sasaran yang menerima bantuan, peneliti melakukan pengamatan kepada kelompok sasaran. Pengamatan dilakukan juga dengan wawancara langsung dengan kelompok Tani Widodo yang diketuai oleh Bapak Harso Sentono. Kelompok Tani Widodo memperoleh bantuan dari instrumen kelembagaan yang dibentuk P2SEDТ, yaitu program percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal. Berikut hasil wawancara langsung dengan Bapak Harsosentono:

“Kelompok tani widodo ini mendengar dari PPL yang pernah datang kesini kalau ada bantuan tapi disuruh buat proposal dulu. Terus satu bulan berikutnya setelah proposalnya diterima Bappeda, kelompok tani saya dipanggil rapat ke Bappeda. Kemudian bantuannya tidak lama terus datang. Tapi kami juga kurang tahu tentang adanya tim pendamping seperti yang tadi ditanyakan KPPSB dan TFD, saya kurang tahu. Soalnya kita juga kurang pendampingan. Seingat saya, dari TFD baru tiga kali. Tapi sekarang ini sudah diadakan pertemuan di Desa kami.

Juga pelatihan tentang kewirausahaan yang sangat membantu kami.”

Bapak Harso Sentono banyak memaparkan keluhan kurangnya pengetahuan tentang pengembangan potensi desa yang dimilikinya, berawal dari potensi pertanian dan peternakan, bahkan kurang interaktif antara tokoh desa yang menjabat sebagai KPPSB dengan kelompok sasaran. Dari pendekatan sosial ekonomi untuk melihat kemauan dan kemampuan kelompok sasaran dalam mengembangkan program secara terus menerus dapat dilakukan dengan membandingkan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program dari aspek pembangunan sosial dan ekonomi setelah mendapatkan bantuan yang dimiliki oleh kelompok sasaran, khususnya kelompok Tani Widodo dan masyarakat Desa Jetis.

Kelompok kerja ini dikumpulkan di rumah bapak Harso Sentono selaku ketua kelompok. Banyak informasi dan keluhan muncul, yaitu kurangnya sosialisasi program dengan baik, karena kelompok sasaran merasa kurang permodalan, pendampingan dan mendapat informasi penting mengenai pembangunan desa. Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok sasaran:

“ Karena saya dan teman-teman ini tidak mempunyai modal usaha dan kemampuan wirausaha untuk mengembangkan peternakan atau pertanian, ya kayak gini, tidak untung banyak, malah kadang-kadang, ya, nombok. Lah gimana, program pemerintah itu masuk ke sini, saya dan teman-teman kurang tahu.”

Bapak Harjo Sentono juga banyak menceritakan bahwa penguatan kelembagaan yang diperoleh dari sosialisasi KPPSB, membawa dampak yang baik bagi kelangsungan dan kesinambungan program. Terbukti, kelompok sasaran sudah dapat menggulirkan bantuan program dan dapat membentuk embrio baru ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan sosial ekonomi Desa Jetis. Kondisi di atas mencerminkan bahwa tingkat kemauan dan kemampuan kelompok sasaran untuk mengembangkan program sudah baik. Keadaan Desa Jetis sebelum menerima program pembangunan, kondisi sosial ekonominya kurang, banyaknya

pengaduan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur terutama di bidang pembangunan poros jalan Desa yang kurang baik, pendidikan dan pengetahuan sampai tata Desa yang kurang dan belum memenuhi standar hidup mewarnai sejak Desain program ini muncul hingga dalam pelaksanaan program. Banyak perbedaan tingkat pembangunan sosial ekonomi yang diperoleh setelah adanya program ini. Masyarakat sudah terlatih dan bahkan dapat menyusun proposal sendiri untuk pembangunan Desa, dan dapat mengembangkan kebersamaan dalam pembangunan daerah tertinggal yang berbasis pada kemampuan daerah otonom, serta mampu mengembangkan potensi lokal yang berdaya saing. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Desa Jetis mengalami peningkatan karena pendampingan KPPSB yang makin memenuhi proporsi kerjanya.

Kemampuan kelompok sasaran untuk mengembangkan program di Desa Jetis juga sudah tergolong baik. Mereka mampu mengembangkan masyarakat Desa berarti membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri, agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan (Wiryanto, 1973). Kemampuan dan kemauan mengembangkan program ini bermaksud agar mereka bergerak secara metodis, efisien dan terorganisir. Satu gerakan masyarakat yang tidak terorganisir dan tidak mengetahui cara kerjasama menurut pola-pola modern, tidak akan dapat memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi pada masa sekarang ini. Jika dilihat dari tingkat aspek sosial dan ekonomi, perkembangan pembangunan P2SEDIT sudah cukup baik, dan sudah ada dana yang digulirkan lagi. Hal ini sudah menjadi bukti bahwa kelompok sasaran sudah dapat mengembangkan program dan hasilnya adalah kesinambungan yang baik. Adanya suatu inovasi dan kreatifitas kelompok sasaran untuk menciptakan sumber-sumber pembangunan juga sangat proaktif. Partisipasi menjadi satu komponen yang harus ada dalam konsep pembangunan sosial ekonomi. Melalui proses partisipasi itu, kemampuan kelompok sasaran dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat.

4. Arus Manfaat Yang Diterima Kelompok Sasaran

Kesinambungan suatu program mensyaratkan adanya arus manfaat yang diperoleh kelompok sasaran program secara terus menerus dan meningkat. Dengan adanya program P2SEDT kelompok sasaran menikmati hasil program dari yang kecil sampai yang besar. Sesuai dengan desain program P2SEDT, kegiatan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Desa Jetis sebagai kelompok penerima manfaat, dengan rincian kelompok sasaran adalah berupa lembaga sosial ekonomi mikro yang memiliki jumlah anggota maksimal 25 orang berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah setempat. Salah satu ketentuannya anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, perajin, peternak, nelayan dan pedagang kecil, dengan alokasi berbagai jenis kegiatan meliputi ekonomi produktif dan peningkatan kualitas pembangunan sosial dan ekonomi.

Berkaitan dengan arus manfaat yang diterima kelompok sasaran ini, seorang kelompok sasaran mengatakan: "Mengenai manfaat adanya P2SEDT ini betul-betul sangat kami rasakan, terutama untuk menambah pengetahuan bagaimana cara bisa menjadi desa yang berkembang seperti desa yang maju lainnya. Di samping itu beberapa kali kami juga mengikuti pelatihan pengelolaan usaha maupun pelatihan teknis kewirausahaan yang dilaksanakan oleh KPPSB desa kami dan banyak manfaatnya, kami jadi tahu bagaimana berwirausaha dan bagaimana mengembangkan desa."

Proses pelaksanaan P2SEDT melalui proses pendampingan masyarakat yang dilaksanakan oleh konsultan pendamping dalam hal ini KMK (Konsultan Manajemen Kabupaten), dalam rangka menjamin kesinambungan program, KMK harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab moral untuk melakukan pendampingan pada tahap keberlanjutan, sehingga kelompok sasaran dapat benar-benar mandiri dan berdaya. Analisis kelayakan usaha terhadap penerima manfaat perlu memperhatikan kelompok sasaran dari program P2SEDT, yaitu masyarakat Desa Jetis.

Program P2SEDT bertujuan penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah

daerah (kabupaten), untuk dapat menggerakkan potensi daerah tertinggal. Dari aspek peningkatan pembangunan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, yaitu memberikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam menganalisis kondisi aktual di lingkungannya, merumuskan masalah dan memanfaatkan peluang yang ada. Masyarakat Desa Jetis memang masih identik dengan kemiskinan dengan faktor penyebab karena kurang akses terhadap teknologi dan kesehatan, dan kurangnya infrastruktur pendukung pertanian dan peternakan.

Bagi kelompok sasaran di Jetis, dengan adanya P2SEDT sudah dirasakan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, secara konkrit bisa dilihat adanya perubahan tata desa dan permukiman yang sehat setelah dilakukan beberapa kali KPPSB terjun lapangan dan menindaklanjuti kekurangan desa tersebut, peningkatan pemanfaatan pertanian atau peternakan yang dilakukan secara produktif, serta peningkatan pengetahuan kewirausahaan yang didapat setelah adanya program stimulan.

Sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan seolah-olah bantuan stimulan P2SEDT adalah dana cuma-cuma pemberian pemerintah kepada masyarakat, karena masyarakat seolah-olah dimanjakan oleh adanya banyak bantuan cuma-cuma, sehingga mental yang hanya menerima bantuan tetapi tidak berpikir untuk memberdayakan program masih menjadi budaya masyarakat, sehingga sangat bertentangan sekali dengan semangat program P2SEDT yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi dengan beberapa pelatihan dan pertemuan yang di adakan KPPSB untuk masyarakat Desa Jetis, masyarakat kemudian terlatih untuk mengembangkan program dengan baik.

Secara konkrit, program dimaksudkan sebagai umpan untuk masyarakat Desa Jetis agar berdaya dan tidak lagi bergantung pada pemerintah. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi diperlakukan sebagai subjek yang dapat berdaya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan.

5. Interpretasi Data

Dalam rangka kesinambungan program di masa datang, ditentukan aspek pemberdayaan masyarakat dan relevansi program dalam pengelolaan program P2SED. Orientasi program agar terjamin kesinambungannya membutuhkan orientasi birokrasi dan pendamping ke arah fasilitator pemberdayaan. Pemberdayaan memberi dorongan yang berhubungan erat dengan tinggi rendahnya kesinambungan program. Sesuai dengan pendapat Tjokrowinoto (1987, 2000), bahwa pihak ketiga baik pemerintah maupun NGO yang mampu menempatkan sebagai fasilitator akan memungkinkan berkurangnya ketergantungan kelompok sasaran pada birokrasi dan menjamin tumbuhnya *self sustaining capacity*, *self sufficient*, dan *self reliant* dan suatu *enabling social setting* bagi kelompok sasaran menuju kesinambungan program pembangunan. Sebaliknya, apabila hanya memandang kelompok sasaran yang tidak mempunyai aspirasi dan kepentingan sendiri, tidak berpengalaman dalam pembangunan, hanya sebagai objek dan bukan sebagai aktor penentu hanya menghambat pemberdayaan kelompok sasaran dan tumbuhnya *self sustaining capacity of development* kelompok sasaran. Untuk menumbuhkan atau meningkatkan partisipasi sebagai salah satu ciri dalam pemberdayaan untuk menciptakan kesinambungan program, kelompok sasaran harus diberi kesempatan terlibat dalam program pembangunan mulai tahap perencanaan sampai pengawasan. Kelompok sasaran harus ditempatkan sebagai fokus dan sumber utama pembangunan, sehingga bisa ditarik "pemberdayaan sejati" yang tinggi dan mendorong tingginya derajat kesinambungan program.

Dari hasil penelitian terbukti bahwa faktor penguatan kapasitas kelembagaan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan program, seperti kelembagaan masyarakat yang telah dibangun dalam pengelolaan program secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab, pendekatannya dimulai dari kelompok sasaran sebagai pihak yang menerima manfaat langsung program. Pembangunan harus menggunakan pendekatan dari bawah dengan mengacu pada paradigma pembangunan yang berpusat

pada manusia (*people centered development*). Penggunaan pendekatan dari bawah dalam program P2SED mengandung implikasi bahwa pelaksanaan program harus bertumpu pada sumber lokal, mengandalkan kemampuan, komitmen serta *input* kelompok sasaran sehingga *self sustaining capacity* tercapai. Untuk memobilisasi berbagai sumber daya lokal bagi kesinambungan program, penguatan kapasitas kelembagaan pada kelompok sasaran merupakan variabel yang penting untuk diperhatikan dalam manajemen program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penguatan kelembagaan sudah mendapatkan porsi penting sejak desain program hingga dalam pelaksanaan P2SED. Penguatan kapasitas kelembagaan mempengaruhi kesinambungan program P2SED, di lapangan membuktikan bahwa berfungsinya pembangunan prasarana/sarana fisik dan terpelihara kegiatan non-fisik yang menunjang kualitas hidup masyarakat meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sistem pembangunan partisipatif dan mekanisme pelaksanaan program penguatan kelembagaan masyarakat melalui P2SED dapat di pelihara untuk memperkuat proses pembangunan di daerah. Berfungsinya kelembagaan masyarakat yang telah dibangun dalam pengelolaan program secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

E. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini dapat menyimpulkan sebagai berikut. Kondisi *self sustaining capacity*, *self sufficient*, dan *self reliance* masyarakat dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), adalah sesuatu yang penting dan urgen sehingga keberlanjutan program mutlak dapat direalisasikan dalam sebuah program pembangunan. Kesinambungan P2SED di Desa Jetis sudah cukup bersinambungan baik, hal ini dibuktikan dengan berfungsinya prasarana/sarana yang telah dibangun secara fisik dan terpeliharanya kegiatan non-fisik yang menunjang kualitas hidup masyarakat meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sistem pembangunan partisipatif dan mekanisme pelaksanaan program penguatan kelembagaan

masyarakat melalui P2SEDТ dapat dipelihara untuk memperkuat proses pembangunan di daerah. Berfungsinya kelembagaan masyarakat yang telah dibangun dalam pengelolaan program secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Dalam penelitian ini telah terungkap bahwa kesinambungan program P2SEDТ dipengaruhi oleh proses pemberdayaan kelompok sasaran dan evaluasi program dengan kebutuhan kelompok sasaran, yang merupakan sesuatu yang dirasakan sudah mendapat perhatian yang cukup atas program P2SEDТ di Desa Jetis. Penelitian ini menemukan adanya pola hubungan proses pemberdayaan kelompok sasaran dengan tingkat kesinambungan program dimana proses pemberdayaan cukup partisipatif dan mampu menumbuhkan kesadaran kelompok sasaran, menyebabkan tingkat kesinambungan P2SEDТ di Desa Jetis cukup berkembang.

Orientasi pelaksana program yang dibutuhkan adalah yang mampu memberdayakan (*empowering*) dan mendorong (*supporting*) kelompok sasaran ke arah kemandirian yang tercermin dari aspek partisipasi, penumbuhan kesadaran kelompok. Dengan kondisi semacam ini berarti telah menciptakan situasi lingkungan yang memungkinkan (*enabling setting*) bagi tumbuhnya *self sustaining capacity* kelompok sasaran. Direkomendasikan bahwa untuk kesinambungan program yang akan datang agar lebih mengintensifkan pendampingan kader penggerak pembangunan satu bangsa (KPPSB), supaya tidak terjadi kurangnya sosialisasi di awal program, yaitu pada awal program percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDТ), walaupun setelah program tersebut berjalan dua tahun kemudian berjalan dengan baik. Perlu tim pendamping dan pelaksana agar meningkatkan upaya pemberdayaan yang baku dan lebih intensif dengan menekankan pada aspek partisipasi, penumbuhan kesadaran kelompok sasaran demi terjaganya kesinambungan di masa datang.

Pustaka Acuan

Adi, Asbandi Kuleminto, (2003), *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.

Agnes Sunartiningsih (Eds), (2004), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media Bekerjasama dengan Jurusan Sosiatri Fisipol UGM.

Baiquni M, Susilawardani, (2002), *Pembangunan yang tidak Berkelanjutan*, Yogyakarta: Transmedia Global Wacana.

Bambang Rudito, (2009), *Masalah dan Sumber Daya Di Daerah Perbatasan*, Jakarta: P3KS.

Cernea, Michael M, (1986), *Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan: Variabel-variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan* (Terjemahan), Yogyakarta: UI Press.

Innayatullah dalam Sulistyo dan Ninik Sri Rejeki, (1994), *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Yogyakarta: Aditya Media.

Meleong, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.

Mubiyarto dalam Syahrir, (1996), *Kajian Program IDT*, Jakarta: Bappenas.

Muttulada, (1989), *Desentralisasi dalam Manajemen Pembangunan: Suatu Tinjauan dari Sudut Kodrat Kebudayaan*, Jakarta: Sinar Harapan.

Noeng Mahadjir, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

Robert Chambers, (1983), *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.

Soetomo, (1995), *Beberapa Kasus Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Fisipol UGM.

Subejo dan Supriyanto, (1997), *Birokrasi Pengembangan dan Pengetasan Kemiskinan*, Yogyakarta: HUP

Sutrisno Hadi, (2004), *Metodologi Research 4*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Tjokrowinoto, Moeljarto, (1987), *Politik Pembangunan : Sebuah Konsep, Arah, dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Wibawa, Samodra (Eds), (1991), *Pembangunan Berkelanjutan : Konsep dan Kasus*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

———, (2008), *RAD P2SEDТ*, Penerbit Bappeda Gunungkidul, (tidak dipublikasikan).

———, (2008), *Pedoman Umum P2SEDТ Penguatan Kapasitas Kelembagaan*, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, (Tidak dipublikasikan).

_____, (2008), *Buku STRADA*, Penerbit Bappeda Gunungkidul, (Tidak dipublikasikan).

Wiryanto, Wehner, (1973), *Membangun Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alumni, Angkasa Offset.

<http://www.kemenegpdrt.go.id>. *KTI dan Kabupaten Tertinggal*, 16 Juni 2014.

<http://www.kemenegpdrt.go.id>. *Kriteria Daerah Tertinggal*, 16 Juni 2014.